

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu merupakan wajah dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat sekaligus menjadi tempat untuk memilih seorang pemimpin. Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 1955 sampai masa sekarang, dan menjadi ajang bagi masyarakat untuk bisa menilai para kontestan Pemilu dalam menawarkan ide gagasan dan program kandidat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana arah perjalanan suatu negara atau daerah yang akan dipimpinnya.

Di era modern seperti sekarang ini, pemilu menjadi instrumen penting dikarenakan beberapa hal, yaitu: Pertama, pemilu menjadi mekanisme penting bagi keberlangsungan demokrasi. Kedua, pemilu menjadi sistem negara demokrasi. Ketiga, pemilu menjadi penting dibicarakan mengenai implikasi yang ditimbulkan dari adanya penyelenggaraan pemilu.¹

Pemilu menjadi sebuah instrument sirkulasi kepemimpinan nasional dan daerah, akan tetapi pemilu bukan saja merupakan ajang perebutan jabatan politik saja, namun menjadi tempat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Melalui pemilu juga warga negara memiliki mekanisme untuk mengawasi pemerintahan mereka. Mereka dapat memutuskan apakah para pemimpin yang duduk saat ini di

¹ Zainul "Netralitas KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017" *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 41, no. 65 (2019): 7681–7724.

posisi mereka layak untuk tetap berkuasa atau apakah perlu ada perubahan dalam kepemimpinan.

Tak hanya itu, dalam sistem demokratis pemilu membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih pemerintah mereka dan juga untuk menggantinya jika diperlukan, menjaga keterbukaan dan batasan kekuasaan.

Pemilu yang menjadi salah satu tiang atau pilar penting dalam sistem demokrasi modern, merupakan cara pokok bagi warga negara dalam sebuah negara demokratis untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan untuk mengekspresikan preferensi politik mereka.² Pemilu memberikan warga negara kesempatan untuk mengekspresikan preferensi politik mereka. Ini berarti mereka dapat memilih partai politik atau kandidat yang mewakili nilai-nilai dan tujuan mereka dalam proses legislatif atau pemerintahan.

Adanya pemilu tidak lepas dari partisipasi masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat sebagai pemilih merupakan enzim penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Salah satu ukuran penerapan kekuasaan negara yang paling sah (kedaulatan rakyat), yang diwujudkan dalam bentuk pemilu pada pesta demokrasi, adalah keterlibatan politik.

Keberhasilan suatu negara demokrasi bisa dilihat dari seberapa tingginya tingkat partisipasi politik, semakin tinggi partisipasi politik pada suatu negara demokrasi maka mengidentifikasikan bahwa rakyat peduli dan mengikuti serta

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, 2011, h. 1.

melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya semakin rendah tingkat partisipasi politik pada suatu negara demokrasi maka mengidentifikasi bahwa rakyat tidak peduli dan kurang menaruh apresiasi dari kegiatan kenegaraan.³ Oleh karena itu tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting untuk ditilik terhadap jalannya proses demokrasi.

Realita yang terjadi pada masa sekarang adalah terjadi penurunan tingkat partisipasi politik di Indonesia setelah pasca reformasi. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal dan internal. Penurunan tingkat partisipasi politik merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia dan hal ini bukanlah masalah yang sepele. Kebanyakan masyarakat menjadi apatis terhadap politik dikarenakan masyarakat sudah mampu melihat dinamika politik di Indonesia, yang mana sebelumnya kebanyakan masyarakat ditekan dan terisolasi mengenai politik. Banyak media massa yang menyajikan dinamika politik di Indonesia, media massa memberikan informasi mengenai elite politik yang terlibat korupsi, buruknya birokrasi, serta isu-isu politik lainnya yang membuat pemahaman masyarakat terhadap citra politik sebagai sesuatu yang kotor, buruk dan korup.⁴

Adapun hasil survey mengenai partisipasi masyarakat terhadap pemilu, karena pemilu merupakan hal yang penting bagi berjalannya sistem demokrasi.

³ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57.

⁴ Fisip USU, "Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik," 2020.

Berikut hasil persentasi partisipasi masyarakat pada pemilu dari tahun 2004 sampai 2019 :

Tabel 1.1 Tingkat Golput dalam Pemilihan Umum tahun 2004 – 2019.

No	Periode	Persentase Suara Partisipasi	Persentase Suara Golput
1.	2004	78.2%	21.8%
2.	2009	76.6%	23.4%
3.	2014	71.7%	28.3%
4.	2019	65.0%	35.0%

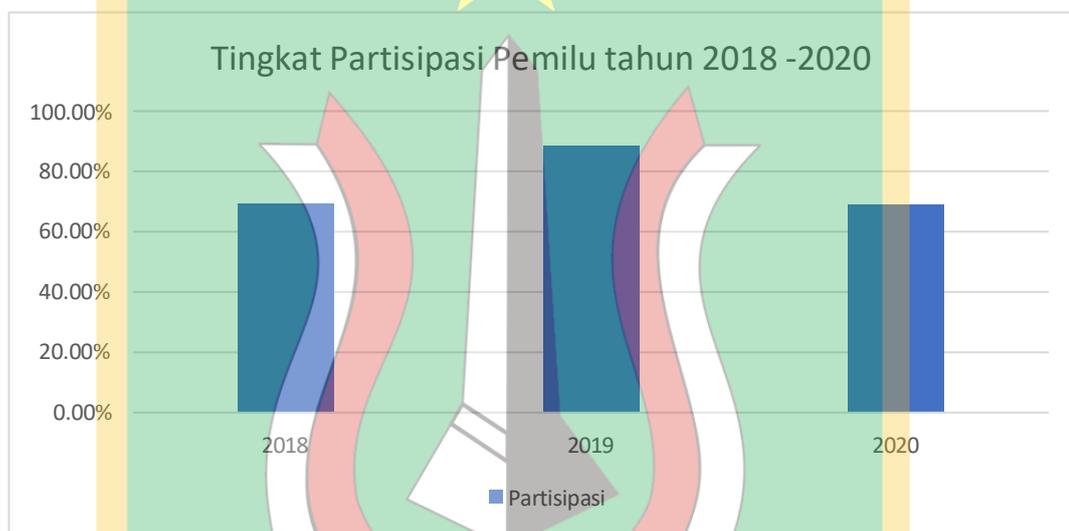
Sumber : Lembaga Survey Indonesia (LSI): *Jumlah Golput di Pilpres tahun 2019 Paling Rendah Sejak tahun 2004.*⁵

Dari tabel yang dihasilkan, dapat diperoleh data mengenai tingkat golongan putih (Golput) sejak tahun 2004 sampai tahun 2019 terus meningkat secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun di tiap tahun pada masa pemilu. Masyarakat menilai bahwa siapapun elite politik yang menjabat maka tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Bisa dikatakan bahwa masyarakat sudah muak mengenai persoalan politik dan menjadikan fenomena golput untuk melepas lelah mengenai politik yang terus tidak sesuai oleh keinginan rakyat.

⁵ Lembaga Survey Indonesia, “*Jumlah Golput Di Pilpres Tahun 2019 Paling Rendah Sejak Tahun 2004,*” *n.d.*

Fenomena tersebut telah terjadi di Kota Bandar Lampung. Sikap masyarakat yang apatis pada persoalan politik, mengakibatkan terjadinya kenaikan dan penurunan tingkat partisipasi pada pemilu. Hal ini dapat kita lihat dari data partisipasi masyarakat kota Bandar Lampung pada masa Pemilu tahun 2018, 2019 dan 2020. Berikut hasil data partisipasi pemilih :

Tabel 1.2 Data Partisipasi Pemilu tahun 2018 – 2020 di Kota Bandar Lampung



Sumber : *Dokumen KPU Provinsi Lampung*⁶

Pada tanggal 27 Juni 2018, telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia yang melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Salah satu provinsi yang mengikuti Pilkada Serentak adalah kota Bandar Lampung. Dari hasil rekapulasi data yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung, pada Pilkada 2018 kota Bandar Lampung mempunyai 656,894 DPT dengan tingkat partisipasi masyarakat sekitar 69,41%.

⁶ KPU Lampung, “*Data Partisipasi Provinsi Lampung*,” n.d.

Kemudian jika kita lihat pada tahun 2019 terjadi peningkatan partisipasi pemilih di kota Bandar Lampung, yang mana kota Bandar Lampung mendapat jumlah DPT terbanyak keempat dengan jumlah 638.174 pemilih. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, penyelenggara pemilu baik itu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, serta para pasangan calon kandidat terus mensosialisasikan pemilu 2019 agar dapat mengantisipasi masyarakat apatis atau bisa disebut sebagai golongan putih (Golput. Hasil dari pilpres tahun 2019 mendapatkan bahwa angka partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Rekapitulasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	DPT	Partisipasi	%
1	Bumi Waras	35.096	27.876	72,52%
2	Enggal	16.523	31.383	89,42%
3	Kedamaian	33.877	13.915	84,22%
4	Kedaton	31.039	28.075	85,07%
5	Kemiling	47.052	42.560	90,45%
6	Labuhan Ratu	29.593	25.051	90,45%
7	Langkapura	24.143	21.728	84,65%
8	Panjang	43.208	38.435	90,00%
9	Rajabasa	28.283	25.688	88,95%
10	Sukabumi	38.099	35.178	90,82%

11	Sukarame	37.653	33.622	92,29%
12	Tanjung Seneng	33.922	29.558	87,14%
13	Tanjung Karang Barat	34.864	31.864	91,40%
14	Tanjung Karang Pusat	34.659	26.949	80,64%
15	Tanjung Karang Timur	21.738	20.313	93,44%
16	Teluk Betung Barat	22.042	19.189	87,06%
17	Teluk Betung Selatan	27.668	22.729	82,15%
18	Teluk Betung Timur	28.722	25.329	88,19%
19	Teluk Betung Utara	20.499	27.907	91,50%
20	Wayhalim	39.494	36.172	91,59%
Total		638.174	565.463	88,61%

Sumber : Dokumen KPU Provinsi Lampung⁷

Perubahan tingkat partisipasi pada Pilgub tahun 2018 ke Pilpres tahun 2019 mengalami kenaikan partisipasi pemilih yang sangat signifikan, yang mana pada Pilkada 2018 tingkat partisipasi hanya sekedar 69,41% kemudian mengalami peningkatan pada Pilpres dengan menyentuh angka partisipasi 88,61% atau 565.463 suara dari dari total DPT 638.174. Kemudian jika kita lihat data tingkat partisipasi pemilu yang ada di tiap Kecamatan Kota Bandar Lampung mencapai rata-rata partisipasi yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu sekitar 77,5%. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, hanya satu kecamatan yang dibawah target KPU yang mana Kecamatan Bumi Waras hanya menyentuh partisipasi 72,52% pemilih.

⁷ KPU Lampung "Data Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung".

Pada tahun 2020 merupakan tahun semua sektor mengalami dampak negatif yang sangat signifikan dikarenakan pandemi Covid-19. Meskipun dilanda Covid-19, pemerintah tetap menetapkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 akan diadakan Pemilu Serentak diberbagai wilayah Indonesia. Provinsi Lampung sendiri diikuti 8 Kabupaten/Kota dengan pemilihan Walikota yaitu Kota Metro, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1.4 Data Rekapitulasi Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1	Bumi Waras	5	99	35.347
2	Enggal	6	48	17.403
3	Kedamaian	7	86	33.403
4	Kedaton	7	87	32.620
5	Kemiling	9	122	45.929
6	Labuhan Ratu	6	81	31.008
7	Langkapura	5	60	24.133
8	Panjang	8	123	42.564
9	Rajabasa	7	76	28.486
10	Sukabumi	7	106	42.496

11	Sukarame	6	98	37.090
12	Tanjung Seneng	5	87	33.212
13	Tanjung Karang Barat	7	93	36.648
14	Tanjung Karang Pusat	7	74	28.935
15	Tanjung Karang Timur	5	52	22.909
16	Teluk Betung Barat	5	59	23.128
17	Teluk Betung Selatan	6	84	30.957
18	Teluk Betung Timur	6	80	29.292
19	Teluk Betung Utara	6	73	29.277
20	Wayhalim	6	112	42.451
	Total	126	1700	647.278

Sumber : Dokumen KPU Provinsi Lampung⁸

Hasil pemilu serentak yang ada di Kota Bandar Lampung terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih. Jika kita bandingkan pada pemilu pada tahun 2019 yang memiliki tingkat presentase pemilih sebesar 88,61%, pada Pemilu Serentak tahun 2020 tingkat presentasi pemilih hanya sebesar 69,13% atau 447,445 suara dari total suara 647,278. Hal ini berarti pada Pemilu 2019 dan Pemilu Serentak 2020 mengalami penurunan pemilih sebanyak 19,48%.

Terjadinya perubahan tingkat partisipasi masyarakat di kota Bandar Lampung tentu dipengaruhi oleh dinamika politik. Dinamika politik merujuk pada proses-proses, interaksi, dan perubahan yang terjadi dalam sistem politik suatu negara atau

⁸ KPU Lampung "Data Rekapitulasi Walikota Bandar Lampung tahun 2020".

masyarakat. Ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan perubahan kebijakan politik, serta interaksi antara berbagai aktor politik dalam proses tersebut. Dalam pemilihan umum dinamika politik mencakup mengenai kampanye politik pemilihan kandidat, dan perubahan kekuasaan politik yang terjadi sebagai hasil dari pemilihan. Dengan demikian, dinamika politik mencakup berbagai aspek yang kompleks dan beragam dalam proses politik suatu negara atau masyarakat.

Leo Agustoni mengemukakan bahwa dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Meskipun isu partisipasi sudah lama dibahas, akan tetapi tetap menjadi problematik dikarenakan pemaknaan partisipasi yang bias.⁹ Dinamika politik secara langsung memberikan pengaruh yang kuat kepada masyarakat sehingga memberikan timbal balik dengan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal dikemukakan juga oleh Dwiyanto yang mana ia mengemukakan bahwa dinamika politik dapat diartikan sebagai gambaran dari proses politik sehingga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas.¹⁰ Ada berbagai cara mengenai bagaimana dinamika politik dapat mempengaruhi partisipasi pemilih, yaitu kampanye politik, polarisasi politik, isu-isu penting, modernisasi dan kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Peningkatan dan penurunan partisipasi pemilih juga tidak bisa lepas dari faktor perilaku pemilih. Dalam konteks politik ada dua faktor yang mempengaruhi

⁹ Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal, Cet.1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 62.

¹⁰ Dwiyanto, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 110.

perilaku pemilih yaitu faktor eksternal dan faktor internal.¹¹ Faktor eksternal merupakan perilaku pemilih yang berasal dari luar dirinya. Contohnya adalah administrasi, sosialisasi, media sosial, serta geografi dan cuaca. Sedangkan faktor internal merupakan perilaku pemilih berdasarkan tidak menggunakan hak pilihnya yang bersumber dari dirinya sendiri. Contohnya adalah kesadaran politik dan pekerjaan.

Tingginya partisipasi pemilih bisa didorong adanya kesadaran politik dari seseorang. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai kesadaran politik yang tinggi dan mengetahui sistem politik, dapat mendorong seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi mereka. Sedangkan menurunnya tingkat partisipasi pemilih bisa didorong dengan rasa kekecewaan pada politik sehingga seseorang melampiaskan rasa kekecewaan tersebut untuk tidak berpartisipasi dalam memilih.¹² Menurut Arifin ia mengatakan bahwa kecenderungan suatu individu atau kelompok tidak berpartisipasi dalam pemilu adalah karena rasa kekecewaan (*disillusionment*). Kekecewaan masyarakat tersebut semakin meningkat dengan banyaknya kasus-kasus yang melibatkan elite politik atau partai politik, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan seseorang terhadap politik itu sendiri.¹³

¹¹ Bismar Arianto and Raja Ali Haji, "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu," n.d.

¹² Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik Dan Demorasi Di Lima Negara*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984, 1984) h. 55-56.

¹³ Arifin, *Politik Pencitraan Pencitraan Politik* (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2014) h. 96.

1.2 Rumusan Masalah

Terjadinya perubahan tingkat partisipasi masyarakat tentu dipengaruhi oleh dinamika politik itu sendiri. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dinamika politik itu berkaitan dengan partisipasi dan demokrasi. Dinamika politik dalam konteks pemilu berkaitan dengan masa kampanye, termasuk isu-isu yang dibahas, polarisasi dan strategi memobilisasi massa dari pihak-pihak politik. Kota Bandar Lampung sendiri telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak tiga kali pada tahun 2018 – 2020, yang mana pada tahun 2018 terjadi Pilgub, tahun 2019 terjadi Pilpres dan Pileg, serta pada tahun 2020 terjadi Pilkada serentak. Hasilnya adalah terjadi peningkatan dan penurunan tingkat partisipasi pemilih. Maka dari itu, peneliti mencapai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung pada pemilu tahun 2018 – 2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika politik yang terjadi pada pemilu tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat menyebabkan tingkat perubahan partisipasi pemilih. Dalam menentukan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait. Setelah itu, diharapkan dapat menjadi panduan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas

subjek-subjek terkait, sehingga menjadikan penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I memaparkan latar belakang penelitian dan alasan pemilihan lokasi penelitian. Peneliti menuliskan pemilu yang terjadi pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami dinamika yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilu dari tahun ke tahun. Baik itu secara faktor internal dan faktor eksternal yang mengakibatkan adanya perbedaan partisipasi yang signifikan pada pemilu tahun 2018, 2019 dan 2020.

Bab II berisikan hasil kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti kaji. Serta menjelaskan secara deskriptif mengenai teori dan konsep partisipasi politik dan pemilihan umum.

Bab III berisi metode penelitian yang peneliti gunakan saat melakukan penelitian. Pada bab ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif serta menjelaskan teknis analisis data yang digunakan untuk merumuskan pembahasan dalam mencapai sebuah kesimpulan.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti peroleh dari proses wawancara dan observasi. Yang mana hasil dari penelitian tersebut akan menjabarkan secara rinci mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 – 2019.

BAB V berisi kesimpulan dan saran dari hasil penemuan peneliti, sehingga penemuan peneliti dapat memberikan referensi dan acuan bagi pihak manapun yang meneliti penelitian sejenis.

